PENGETAHUAN PENYULUH KEHUTANAN SEBAGAI PELAKU PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN HUTAN

Knowledge of The Forestry Extensionists as a Personal Empowered Empowerment In Management Forest

Hamdani Fauzi
Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan Univeritas Lambung Mangkurat

ABSTRACT. *The aims of this research was to measure the level of knowledge of forestry extensionists as perpetrators of community empowerment in forest management in KPHP Banjar. The combination of post-positivistic paradigm with naturalistic approach to this research. The ability of forestry extensionists as empowerers showed moderate cognitive abilities characterized by high comprehension (77.57), applying (78.96), analyzing (74.09), evaluating (62.96), and creating (64.17). The main factors affecting the performance of forestry extension workers are the number of forestry extension agents, number of forestry extension workers, and career development and career development.*

Keywords*: Knowledge; Forest extensionists; Empowerment*

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan mengukur tingkat pengetahuan penyuluh kehutanan sebagai pelaku pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan di KPHP Banjar. Kombinasi paradigma *post-positivistik* dengan naturalistik menjadi pendekatan dalam penelitian ini. Kemampuan penyuluh kehutanan sebagai pelaku pemberdayaan menujukkan kemampuan kognitif tergolong sedang yang ditandai dengan kemampuan memahami tinggi (77.57), menerapkan (78.96), menganalisis (74.09), mengevaluasi (62.96), dan menciptakan (64.17). Faktor-faktor utama yang mempengaruhi kinerja penyuluh kehutanan adalah jumlah penyuluh kehutanan, jumlah penyuluh kehutanan, penghargaan profesi dan pengembangan karier.

Kata Kunci: Pengetahuan; Penyuluh Kehutanan; Pemberdayaan

Penulis untuk korespondensi, surel: hamdani.fauzi@unlam.ac.id

PENDAHULUAN

Program pemberdayaan masyarakat perdesaan hutan yang berkaitan dengan pembangunan hutan bisa dilakukan oleh penyuluh kehutanan, pendamping masyarakat dan komponen masyarakat lainnya. Lippit (1958) dan Rogers (1983) menyebutnya sebagai "agen perubahan (*agent of change*), yaitu seseorang yang berperan dalam mempengaruhi proses penetapan keputusan masyarakat untuk menerima dan mengimplementasikan inovasi.

Penyuluh kehutanan memiliki peran strategis dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan hutan (Sidu, 2006). Perilaku penyuluh kehutanan yang tercermin dalam aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan harus memiliki kemampuan yang memadai agar kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan optimal. Paradigma baru pemberdayaan masyarakat mensyaratkan perlunya kemampuan penyuluh kehutanan yang memiliki kapasitas yang baik (Hidayat, 2002). Para

penyuluh kehutanan tidak hanya dituntut memiliki wawasan pengetahuan dengan baik, namun juga mesti memiliki keterampilan dalam mengaplikasikan materi penyuluhan dan mempunyai sikap positif mengutamakan kepentingan masyarakat. Kapasitas sebagai pelaku pemberdayaan yang harus dimiliki tenaga penyuluh kehutanan adalah mampu mengeksplorasi dan menumbuhkembangkan segenap potensi sumberdaya yang ada di masyarakat. Optimalisasi potensi sumberdaya lokal perlu dikembangkan agar masyarakat tidak tergantung dengan komoditi dan sumberdaya manusia yang berasal dari luar daerahnya. Hal ini penting digali pelaku pemberdayaan agar masyarakat memiliki keberdayaan dan kemadirian. Dengan kata lain, bahwa pengembangan potensi lokal akan menjadi daya dorong untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berkembang, dan mandiri.

Upaya pemberdayaan masyarakat perdesaan hutan merupakan alternatif untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat berperan serta dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan mengurangi tekanan masyarakat terhadap hutan dan lahan hutan. Pelibatan masyarakat lokal secara partisipatif dalam rangka pengelolaan hutan secara lestari merupakan hal yang penting, di mana perilaku positif masyarakat dibangun dan dikembangkan, sehingga masyarakat dapat menjadi subyek terhadap pengelolaan sumber daya hutan (Suprayitno & Lokal, 2008:137). Hal ini sejalan dengan pendapat Cary (1970) bahwa keberlanjutan pembangunan sangat tergantung dengan partisipasi masyarakat. Untuk mencapai hal itu, maka peran penyuluh kehutanan menjadi sangat strategis dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat pengetahuan penyuluh kehutanan sebagai pelaku pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan di KPHP Banjar.

METODE PENELITIAN

Kombinasi pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap penyuluh kehutanan ditinjau dari komponen aspek kognitif. Kombinasi yang dimaksud dalam penelitian ini terkait indikator penelitian yang dikaji yang memang mengharuskan adanya pendekatan yang berbeda agar diperoleh kedalaman hasil penelitian (Gulo, 2002). Jadi penggabungan dimaksud adalah penggabungan dua jenis data yang berbeda dan menghubungkan dua tahap penelitian yang berbeda.

Penentuan responden yang bersumber dari masyarakat dilakukan secara random dengan Intensitas Sampling 30%. Seluruh penyuluh kehutanan yang bertugas di Kabupaten Banjar dilaksanakan menjadi informan penelitian. Penentuan informan dilakukan berdasarkan pendekatan teknik *purposive sampling*. Pada awalnya informan dipilih didasarkan kepada pengetahuan, pengalaman, dan jabatannya berkaitan dengan kebijakan kehutanan di kawasan hutan, KPH Banjar, perhutanan sosial, atau pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan informan lainnya yang diharapkan dapat memberikan data lebih lengkap.

Data-data kualitatif yang dikuantitatifkan bersumber dari responden menggunakan skala ordinal (skala yang disusun menurut peringkat atau rangking). Model evaluasi yang digunakan berupa model pengukuran *(measurement model*) dalam bentuk tes tertulis berupa kuesioner. Kemampuan penyuluh kehutanan dinilai dari aspek pengetahuan dengan parameter yang diadaptasi dari ranah kognitif Bloom versi Krathwohl (2002). Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Parameter Kemampuan Penyuluh Kehutanan sebagai Pelaku Pemberdayaan

No	Ranah/Jenjang	Parameter
1	Memahami	Memahami pengetahuan pemberdayaan, penyuluhan, teknis kehutanan,pemasaran hasil hutan
2	Menerapkan	Mengaplikasikan hasil pelatihan seperti pengendalian kebakaran, pengaturan jarak tanam, pemilihan jenis tanaman

3	Menganalisis	Menganalisis program pemberdayaan yang telah dilaksanakan dan konflik lahan
4	Mengevaluasi	Mereview kegiatan yang telah dilaksanakan
5	Menciptakan	Membangun demplot percontohan, hasil hutan unggulan

Evaluasi terhadap program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan dilakukan terhadap perilaku penyuluh kehutanan. Aspek pengetahuan dianalisis dengan pendekatan Taksonomi Bloom terkait dengan pengelolaan sumberdaya hutan. Perilaku ranah pengetahuan dilakukan dengan mengajukan pertanyaan berupa *objective test* berbentuk pilihan ganda dengan menggunakan rumus (Rahman, 2010):

$$Sk = \left(B - \frac{S}{n-1}\right) \times Bb$$

Keterangan:
Sk = Skor
B = Jumlah Jawaban Betul
S = Jumlah Jawaban Salah
N = Alternatif Pilihan
Bb = Bobot Jawaban Betul

Untuk mengukur tingkatan domain pengetahuan penyuluh kehutanan dihitung dengan rumus:

$$Ki = \frac{Xi}{5} \text{ x } 100\%$$

Keterangan:
$\mathcal{X}i$ = skor rata-rata untuk responden ke-i
Ki = skor rata-rata pengetahuan responden ke-i

Maka untuk mengetahui katagore manakah perilaku responden ke-i, dapat digunakan rumus:

$$BVi = \frac{\sum_i^n B}{5} \times 100\%$$

BVi = Pengetahuan responden ke-i
5 = skor maksimum skala Likert

Untuk menentukan klasifikasi kategori didasarkan pada prosentase pencapaian skor. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Tingkatan Pengetahuan berdasarkan Pencapaian Skor

No.	Interval Kelas	Katagore Penilaian
1.	≥ 33,33-55,55	Rendah
2.	> 55,55-77,77	Sedang
3.	> 77,77-100	Tinggi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kapasitas Kognitif (Pengetahuan) Penyuluh Kehutanan

Berdasarkan Tabel 3 dari aspek kognitif, penyuluh kehutanan memiliki kemampuan kognitif yang sedang (skor 71,55).

Tabel 3. Kemampuan Kognitif Penyuluh Kehutanan

No	Katagore *	Skor	Kriteria
1	Kapasitas Memahami	77.57	tinggi
2	Kapasitas Menerapkan	78.96	tinggi
3	Kapasitas Menganalisis	74.09	sedang
4	Kapasitas Mengevaluasi	62.96	sedang
5	Kapasitas Menciptakan	64.17	sedang
	Rata-rata	71.55	sedang

Keterangan: * Indikator mengacu Taksonomi Bloom versi Revisi (Krathwohl, 2002:215)

Kemampuan pemahaman penyuluh relatif baik dengan katagore tinggi (77,57). Menurut Krathwohl (2002:215), memahami/mengerti berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi pemahaman terhadap sebuah pengertian yang bersumber dari berbagai pengetahuan, memori atau ingatan yang yang baru saja diperoleh maupun yang sudah lama didapatkan. Pada tahap ini, penyuluh dapat memahami hal-hal penting berkaitan dengan visi misi penyuluhan kehutanan, materi dan metode penyuluh kehutanan dan pemberdayaan masyarakat, teknis kehutanan seperti agroforestri, silvikultur, pemanfaatan dan pemahaman hasil hutan. Kemampuan ini dapat diaplikasikan dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan kemasyarakatan yang lebih beragam (Gunawan & Palupi, 2013:26).

Dari aspek pengetahuan kehutanan, para penyuluh sudah memadai, namun berdasarkan

informasi dari masyarakat menyebutkan bahwa penyuluh kehutanan yang bertugas di daerahnya selama ini kurang memiliki pengetahuan tentang mekanisme pemasaran yang menguntungkan bagi petani, jaringan pemasaran dan tata usaha peredaran hasil hutan.

Dari sisi kemampuan menerapkan (*applying*), penyuluh kehutanan di pada umumnya telah mampu mengaplikasikan teknik-teknik yang berkaitan dengan kehutanan berdasarkan ilmu pengetahuan yang dipelajari pada saat kuliah atau pelatihan sesuai dengan kondisi di lapangan. Misalnya setelah mengikuti pelatihan Silvikultur Intensif (SILIN), mereka sudah bisa menerapkan pengaturan jarak tanam. Pada saat membuat arah larikan tanaman dengan jarak tanam yang sudah ditentukan, kalau luasannya kecil maka pengerjaannya relatif mudah, tapi kalau sudah mencapai puluhan hektar maka praktiknya di lapangan akan susah. Ketika penyuluh yang mempunyai pengetahuan mengenai hal tersebut tentunya hal ini dengan mudah bisa diterapkan pada lahan yang akan ditanami. Begitu pula dalam hal pengendalian kebakaran lahan hutan, penyuluh telah bisa ikut membantu pemadaman kebakaran berdasarkan ilmu yang dipelajari pada saat pelatihan.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyuluh kehutanan pada umumnya telah mampu memiliki kemampuan menerapkan sebagaimana yang disampaikan (Krathwohl, 2002:216), menerapkan merujuk pada kemampuan melaksanakan percobaan atau menyelesaikan permasalahan melalui proses berpikir. Penerapan tersebut didasarkan pada pengetahuan yang diperolehnya. Menurut (Gunawan & Palupi, 2013:27), menerapkan berkaitan dengan dimensi pengetahuan prosedural (*procedural knowledge*). Menerapkan meliputi kegiatan menjalankan tahapan dan mengejawantahkannya. Menjalankan tahapan penyuluhan merupakan proses kognitif dalam menemukan solusi atas permasalahan dan mengimplementasikannya.

Dari aspek analisis, penyuluh kehutanan memiliki skor tinggi (74,09). Menurut (Krathwohl, 2002:216), menganalisis merupakan kemampuan mencari solusi atas suatu masalah, dengan cara mengklasifikasikan masalah dan mengidentifikasi keterkaitan antar masalah sehingga dapat diperoleh berbagai alternatif pemecahan masalah. Pada tahap ini, penyuluh kehutanan sudah memiliki kemampuan untuk melakukan analisis terhadap berbagai persoalan. Aspek kemampuan analisis memiliki posisi yang sangat penting sehingga wajar Gunawan & Palupi, (2013) menyatakan kemampuan menganalisis memiliki nilai strategis penting dibandingkan dimensi proses kognitif lainnya.

Aspek mengevaluasi yang dimiliki penyuluh kehutanan masih tergolong sedang (62,96). Para penyuluh belum terbiasa melakukan evaluasi yang menurut Kuswana (2012:65) berkaitan dengan kemampuan melakukan evaluasi menurut kriteria dan standar yang yang telah ditetapkan. Bagi para penyuluh urusan evaluasi bukanlah wewenangnya melainkan tugas atasan langsung. Hanya 28,57% penyuluh yang memilki kemampuan evaluasi, padahal menurut Kuswana (2012:66), posisi evaluasi dalam taksnomi sangat dihormati sebagai langkah tertinggi, karena merupakan proses dan hasil berpikir yang komplek yang menyangkut kombinasi tingkah laku mulai dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis dan sintesis.

Kemampuan penyuluh kehutanan tersebut menurut Bloom (1956:171) merupakan bagian dari kemampuan melakukan evaluasi. Kemampuan evaluasi berkaitan dengan kemampuan menemukenali dan menimbang nilai-nilai yang dilibatkan dalam tindakan alternatif, kemampuan mengidentifikasi dan menilai pertimbangan nilai-nilai yang dilibatkan dalam pilihan dari suatu tindakan. Evaluasi merupakan bagian penting dalam proses penyuluhan kehutanan, namun sering dianggap upaya mencari-cari kekurangan, kegagalan dan kesalahan suatu kegiatan penyuluhan kehutanan. Kegiatan evaluasi memiliki manfaat untuk melakukan perbaikan dan menyempurnakan program pemberdayaan masyarakat agar lebih optimal untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Di samping itu, evaluasi penyuluhan kehutanan dapat digunakan untuk mengukur kinerja penyuluhan kehutanan.

Dari aspek menciptakan, penyuluh kehutanan memiliki kemampuan yang sedang (64,17). Menciptakan sangat berkaitan erat dengan pengalaman belajar para penyuluh tidak saja dari belajar formal di kelas namun juga praktik di lapangan. Menciptakan di sini mengarahkan pada kemampuan menempatkan dan menghubungkan segenap informasi secara terintegrasi ke dalam suatu gagasan untuk mencapai hasil yang lebih baik (Krathwohl, 2002). Menciptakan di sini menurut Kuswana (2012:118), dalam katagore proses kognitif mencakup kemampuan menghasilkan, merencakan, dan membangun. Berdasarkan kondisi di atas, maka dapat dibuat tahapan capaian aspek kognitif penyuluh kehutanan sebagaimana dapat diihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Kemampuan Kognitif Penyuluh Kehutanan (diadaptasi dari model Taksonomi Bloom (1956) versi (Krathwohl, 2002)

Berdasarkan kondisi tersebut secara umum dari sisi pengetahuan, para penyuluh kehutanan di Kabupaten Banjar sudah mempunyai dasar-dasar pengetahuan praktis pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan hutan, namun masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan. Hal ini senada dengan yang dikemukakan Berlo (1960) bahwa seorang penyuluh harus memiliki 3 (tiga) kemampuan pengetahuan. *Pertama*, mengenai substansi berupa materi, manfaat, dan norma dari pengembangan inovasi, baik aspek keilmuan dan kepraktisan untuk diterapkan masyarakat. Seorang penyuluh kehutanan harus memilki pengetahuan praktis seperti teknologi penyuluhan dan komunikasi, pemberdayaan masyarakat, memiliki pengetahuan aspek teknis dan budidaya hutan serta memahami pengetahuan pengembangan agrisylvobisnis (Anonim, 2010:2). Hal ini sesuai dengan pendapat Hidayat (2003:3), penyuluh kehutanan harus memiliki kemampuan memiliki dan memahami teknologi penyuluhan, kelembagaan lokal, pengetahuan teknis kehutanan dan sistem pengusahaan bisnis kehutanan. Teknologi penyuluhan berkaitan dengan berbagai aspek teknis yang sangat erat hubungannya dengan pengelolaan penyampaian informasi dan tanggapan atau respon dari masyarakat yang diberi penyuluhan. Penyuluh kehutanan bukan hanya harus menguasai teknik kehutanan tetapi juga memiliki wawasan pengetahuan berkaitan dengan kebijakan kehutanan, pemasaran, jaringan kerja kehutanan, dan isu-isu kehutanan terbaru yang berkembang.

Kedua, penyuluh harus memiliki pemahaman mendalam mengenai kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat, sumberdaya alam dan kebutuhan-kebutuhan nyata yang diperlukan masyarakat yang diberdayakan. Seorang penyuluh harus memahami kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki masyarakat dalam usaha mengembangkan keswadayaan dan kemampuan masyarakat untuk bisa mandiri. Minat dan kebutuhan masyarakat, ketersediaan sumberdaya alam serta prioritas hal tersebut tersebut harus dianalisa dan dikaji secara mendalam oleh penyuluh kehutanan. Hal ini penting agar penyuluh mampu mengenali potensi lokal sebagaimana yang dikemukakan Jamasy (2004). Kemandirian masyarakat dapat dirintis melalui pengembangan potensi lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap pihak lain.

Kemampuan kognitif ketiga yang menjadi persyaratan pelaku pemberdayaan menurut Berlo (1960) adalah memahami faktor-faktor cepat atau lambatnya penerimaan masyarakat terhadap inovasi yang dikembangkan. Sementara itu, Hawkins, et al (1982) menekankan agar setiap penyuluh/fasilitator harus k*ompeten*, artinya memahami dan menguasai segala sesuatu yang berkaitan dengan inovasi yang

disampaikannya (baik yang bersifat teknis, ekonomi, maupun kaitannya dengan nilai-nilai sosial budaya.

Faktor yang Mempengaruhi Keberdayaan Penyuluh Kehutanan

Menurut Mardikanto (2000:3), penyuluhan kehutanan adalah proses pengembangan perilaku (pengetahuan, sikap dan keterampilan) masyarakat sasaran untuk bisa berkontribusi positif dalam pelestarian hutan dan lingkungan melalui pengelolaan hutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di lihat dari aspek kognitif, penyuluh kehutanan yang berperilaku positif mampu memberdayakan masyarakat. Untuk itu, penyuluh kehutanan mestinya memiliki pengetahuan kehutanan yang luas seperti silvikultur, manajemen hutan, perhutanan sosial dan teknologi hasil hutan. Mereka juga harus mampu memperbaharui pengetahuan kehutanan yang semakin berkembang dan mudah untuk diakses baik melalui buku, koran, buletin, jurnal maupun secara daring. Penyuluh kehutanan juga harus mempunyai wawasan jauh ke depan apalagi masalah pembangunan kehutanan tidak cukup satu atau dua tiga tahun namun minimal tujuh tahun baru memasuki 1 daur, sehingga ketika ada kesalahan memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk membudidayakan tanaman tertentu maka itu akan berdampak secara luas pada masyarakat. Penyuluh yang memberdayakan masyarakat juga mampu memahami potensi dan kebutuhan masyarakat lokal, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penyusunan perencanaan secara partisipatif dan kemampuan komunikasi yang baik. Kemampuan ilmu komunikasi penting dimiliki seorang penyuluh agar pesan-pesan pembangunan kehutanan dapat diterima oleh masyarakat sasaran secara baik dan benar.

Perilaku afektif berupa kemampuan komunikasi dalam merespon masyarakat, dinamis, dan memiliki komitmen kuat untuk kepentingan masyarakat dan bertanggung jawab merupakan ciri penyuluh kehutanan yang diharapkan bisa memberdayakan masyarakat perdesaan hutan. Sementara itu bermodalkan kemampuan pengetahuan dan sikap yang telah dimiliki maka seorang penyuluh kehutanan secara baik dan tepat dapat mengidentifikasi kebutuhan dan potensi sumberdaya di tingkat lokal, memfasilitasi masyarakat, mampu memotivasi masyarakat dan kemampuan teknologi informasi dalam mencari peluang pengembangan teknologi dan pemasaran.

Untuk melaksanakan hal tersebut, kemampuan yang dituntut bagi penyuluh kehutanan sebagai pelaku pemberdayaan masyarakat harus terlebih dahulu memiliki kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik yang memadai (Sidu, 2006:37). Menurut Yumi, et al.(2011:202), aspek kompetensi pelaku pemberdayaan masyarakat yang bisa mendorong motivasi belajar petani berupa kemampuan penyuluh secara bersama-sama masyarakat dalam menganalisa dan mencari solusi permasalahan, mengembangkan kapasitas petani dan wawasan pengetahuan petani.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penyuluh kehutanan, bahwa faktor-faktor utama yang mempengaruhi kinerja (perilaku) mereka sebagai penyuluh kehutanan adalah jumlah Penyuluh Kehutanan dan pengembangan karier.

Jumlah tenaga penyuluh kehutanan pada saat berada di bawah Dinas Kehutanan Kabupaten Banjar sebanyak 8 orang (2003), 11 orang (2005), 10 orang (2006), dan 14 orang (2008), Pada tahun 2009, tenaga fungsional penyuluh kehutanan di Kabupaten Banjar berjumlah 17 orang dan berada di bawah Badan Pelaksana Penyuluhan (Bappeluh) Kabupaten Banjar bergabung dengan para penyuluh pertanian dan perikanan. Hal ini sebagai implikasi dari keluarnya Undang-Undang tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, nomor 16 tahun 2006. Kalau dari sisi jumlah sebenarnya penyuluh kehutanan Kabupaten Banjar masih di bawah rasio yang seharusnya. Idealnya dalam 1 kecamatan yang berada dan berbatasan dengan kawasan hutan harusnya terdiri dari 1 penyuluh kehutanan ahli dan 3 penyuluh kehutanan trampil. Saat ini jumlah penyuluh kehutanan tinggal 14 orang, karena 3 orang penyuluh kehutanan

pindah atas kemauan sendiri ke instansi teknis (struktural), dan yang sedang mengajukan pindah sebanyak 5 orang.

Menurut Subyek Bapak Misran yang pernah bekerja di Bapeluh Banjar dan sekarang mutasi ke Bakorluh Kalsel menyatakan bahwa:

> *Kepindahan penyuluh kehutanan yang notabene merupakan tenaga fungsional ke tenaga struktural di instansi teknis SKPD Banjar disebabkan oleh karena persoalan penjenjangan karier sebagai penyuluh tidak ada peningkatan. Begitu menetapkan diri sebagai penyuluh maka selamanya akan tetap jadi penyuluh. Beda kalau yang bersangkutan berada di struktural, maka karier akan cenderung menanjak selama tidak ada masalah kepegawaian.* (Wawancara tanggal 19 Maret 2016)

Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 62/1998 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25/2000 yang menyatakan antara lain bahwa penyuluhan kehutanan merupakan salah satu urusan bidang kehutanan yang kewenangannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Semenjak berlakunya kebijakan otonomi daerah, kelembagaan formal yang bertugas menangani penyuluhan kehutanan baik di Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten menjadi sangat beragam. Selain itu, banyak penyuluh kehutanan yang dimutasi ke jabatan struktural atau perpindahan fungsi bekerja di luar bidang kemampuannya sebagai tenaga fungsional penyuluh kehutanan. Situasi dan kondisi ini menyebabkan penyuluh Kehutanan mengalami hambatan dalam pengembangan kariernya.

Pelaksanaan penyuluhan kehutanan akan dapat berjalan lebih baik apabila ada kebijakan yang mendukung pengembangan karier penyuluh kehutanan, dan sertifikasi penyuluh sebagai penghargaan profesi penyuluh kehutanan.

SIMPULAN

Kemampuan penyuluh kehutanan sebagai pelaku pemberdayaan menunjukkan kemampuan kognitif yang tergolong sedang dengan indikator kemampuan memahami tinggi (77.57), menerapkan (78.96), menganalisis (74.09), mengevaluasi (62.96), dan menciptakan (64.17). Faktor-faktor utama yang mempengaruhi kinerja (perilaku) mereka sebagai penyuluh kehutanan adalah jumlah penyuluh kehutanan, penghargaan profesi dan pengembangan karier.

DAFTAR PUSTAKA

Amanah, S. (2007). Makna Penyuluhan dan Transformasi Perilaku Manusia. *Jurnal Penyuluhan IPB*, *3*(1), 63–67. Retrieved from http://journal.ipb.ac.id/index.php/jupe/article/view/2152/1182

Berlo, D.K., 1961. *"The Process of Communication"*. Holt, Rinehart, and Waston. New York

Bloom,B.S. (ed.). 1956. Taxonomy of Educational Objectives:The Classification of Educational Goals dalam Handbook 1: Cognitive Domains. McKay. New York

Brundage,D.H. 1980. *Adult Learning Principles and their Application to Program Planning*. Ministry of Education. Ontario

Cousins, J. Bradley, 2005, Will The Real Empowerment Evaluation Please Stand Up?: A Critical Friend Perspective, Empowerment Evaluation: Principles in Practice, New York: The Gulford Press

Friedmann, Jhon. 1992, *Empowerment: the Politics of Alternative Development*. Blackwell Publisher. Canbridge, Massachusetts, 02142 USA.

Gulo, W, 2002, Metodologi Penelitian. Penerbit PT Grasindo. Jakarta

Gunawan, I., & Palupi, A. R. (2013). Taksonomi Bloom-Revisi Ranah Kognitif:Kerangka Landasan untuk Pembelajaran, Pengajaran, dan Penilaian. Program Studi PGSD FIP IKIP PGRI Madiun. Retrieved from http://www.ikippgrimadiun.ac.id/ejourna

Hidayat, Nur, 2002. Paradigma Penyuluhan Kehutanan. Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan, Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan. Jakarta

, 2003. Penyuluhan Kehutanan, Akan Dibawa Kemana ?. Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan, Sekretariat Jenderal Departemen Kehutanan. Jakarta.

Krathwohl, D.R., 2002. A Revision of Bloom's Taxonomy: An Overview. *Theory Into Practice*, 41(4), pp.212–218. Available at: http://www.tandfonline.com /abs/. **doi 10.1207/s15430421tip4104_2**.

Kuswana, W.S. Taksonomi Kognitif, Perkembangan Ragam Berpikir. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.pp.31-118

Levis, R.L. 2013. Metode Penelitian Perilaku Petani. Penerbit Ledalero. Maumere.p.230

Mardikanto. T. 2007. Bunga Rampai Penyuluhan Kehutanan.Balai Pustaka. Jakarta

Miller, W. G., Snowman, J., & O'Hara, T. 1979. Application of Alternative Statistical Techniques to Examine the Hierarchical Ordering in Bloom's Taxonomy. *American Educational Research Journal*, *16*(3), 241–248. **doi:10.2307/1162776**

Pusluhhut. 2004. Buku Pintar Penyuluhan Kehutanan. Pusat Penyuluhan Kehutanan Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Jakarta

Rahman, A. (2010). *Pengembangan Perangkat Penilaian Hasil Belajar* (3rd ed.,). Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta. p. 432

Sidu, D. 2006. Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan Lindung Jompi Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara (Disertasi). Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor

Suprayitno, A. R., & Lokal, P. M. (2008). Pelibatan Masyarakat Lokal:Upaya Memberdayakan Masyarakat Menuju Hutan Lestari. *Jurnal Penyuluhan IPB*, *4*(2), 2–5. Retrieved from http://journal.ipb.ac.id/index.php/jupe/article/view/2179/1208

Tomlinson, S., 1997. Edward Lee Thorndike and John Dewey on the science of education. *Oxford Review of Education*, 23(3), pp.365–383. Available at: http://links.jstor.org/sici?sici=0305-4985%28199709%2923%3A3%3C365%3AELTAJD%3E2.0.CO%3B2-8.

Utama, S., 2013. Siapkah Penyuluh Kehutanan mendampingi kegiatan kehutanan di lapangan ? *E-Magazine Cyber Penyuluhan Kehutanan*, pp.1–7. Available at: http://bp2sdmk.dephut.go.id/emagazine/index.php.html.

Yumi, S., Gani, D. S., & Sugihen, B. G. 2011. Model Pengembangan Pembelajaran Petani Dalam Pengelolaan Hutan Rakyat Lestari: Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, *8*(3), 196–210. Retrieved from http://www.forda-mof.org/index.php/content/jurnal